

PERPINDAHAN PENDUDUK DAN EKONOMI RAKYAT JAWA, 1900—1980

*Soegijanto Padmo**

1. Pendahuluan

Perpindahan penduduk ke atau dari Pulau Jawa telah terjadi sejak abad ke-18 Masehi atau bahkan abad-abad sebelumnya. Asal usul suku-suku bangsa yang ada di Indonesia yang berasal dari Hindia Belakang serta dataran Indo-China menggarisbawahi suatu hipotesis yang menyatakan bahwa perpindahan penduduk merupakan salah satu ciri yang dijumpai dalam perkembangan peradaban umat manusia. Pada masa pascamasuknya agama Islam ketika peradaban umat manusia telah berkembang relatif maju, perpindahan penduduk masih terus berlangsung. Sudah barang tentu sifat atau faktor penyebab terjadinya pergerakan penduduk itu berbeda dari satu masa dengan masa yang lain.

Dalam masyarakat kerajaan Mataram Lama, yang merupakan masyarakat tradisional Jawa yang tipikal, digambarkan oleh Gonggrijp (1957) bahwa kehidupan masyarakat pedesaan dalam suasana tertekan dan serba kekurangan merupakan pendorong bagi terjadinya perpindahan penduduk. Karena eksploitasi yang dilakukan oleh penguasa dan penjahat sedemikian hebat, tidak ada dorongan bagi masyarakat desa untuk memproduksi dan untuk memperoleh surplus. Suasana kehidupan masyarakat kecil di pedesaan yang tertindas selama beberapa generasi diduga keras sebagai penyebab munculnya tata nilai yang menjadi corak kehidupan masyarakat kecil pedesaan Jawa yang *tepa slira*, tidak ingin mengungguli dalam hal pemilikan barang dari sesama warga desanya, yaitu yang dikenal dengan konsep *leveling-off mechanism* (Sanders, 1967). Konsep *tepa slira*

atau kemauan untuk hidup sama-sama miskin yang seakan-akan dipaksa oleh situasi yang diciptakan oleh sistem sosial itu pada situasi lain justru menjadi suatu kemampuan bagi ekonomi rakyat kecil sebagaimana suatu strategi dalam menghadapi himpitan hidup yang seakan-akan tidak lepas dari mereka atau *self defence mechanism* yang diperkenalkan oleh Geertz (1963) dengan istilah *shared poverty*.

Tekanan atau beban yang harus disanggah oleh penduduk pedesaan pada masyarakat tradisional bukan saja berasal dari penguasa dari tingkat atas sampai penguasa di tingkat bawah. Kedatangan bangsa Eropa di Nusantara yang ingin mengeksploitasi tanah dan penduduk menambah masalah di pedesaan Jawa semakin kompleks.

Mekanisme beladiri dalam menghadapi kesulitan hidup yang tidak tertahankan lagi adalah dengan melakukan perpindahan ke daerah lain, meskipun fenomena tersebut sering dipertanyakan orang. Dengan berpindah tempat berarti seseorang harus meninggalkan tempat yang telah dihuni beberapa lama, tempat tinggal, serta lahan garapan untuk menopang hidupnya. Untuk memperoleh itu semua di tempat yang baru, seseorang harus mengeluarkan tenaga dan biaya tidak sedikit, yang hampir tidak mungkin bagi penduduk pedesaan untuk memperolehnya. Kenyataannya, sejak awal abad ke-18 sampai dengan awal abad ke-20, di Jawa telah terjadi perpindahan penduduk yang berlangsung secara sporadis (lihat Heeren, 1979, Warsito, 1994, Swasono, 1984). Fenomena perpindahan penduduk yang terjadi itu menunjukkan adanya pola tertentu. Salah satu di antara pola perpindahan itu lebih merupakan fenomena

*Doktorandus, Master of Science, Doctor of Philosophy, staf pengajar Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra, UGM

sosial yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang dengan motivasi pribadi atau kelompok untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Pola yang lain adalah lebih bermuatan politik, yang berupa program perpindahan penduduk secara terencana, yang dilaksanakan oleh pemerintah seperti pengerahan tenaga kerja untuk perkebunan pada masa penjajahan Belanda pada awal abad ke-20 sampai pelaksanaan program transmigrasi pada masa kemerdekaan. Sementara itu, terdapat ragam yang lain, yaitu percampuran antara pola perpindahan penduduk secara spontan dengan perpindahan yang diatur.

Secara konseptual, selama dua abad terakhir, ekologi pedesaan memang telah berubah, baik secara sosial dan kultural (Kartodirdjo, 1992) maupun secara sosiologis-agronomis (Sajogya dan Sajogya, 1974). Dalam dinamika perubahan yang didorong oleh kekuatan internal dan eksternal itu ternyata petani lapisan bawah yang mungkin tetap menjadi objek dan menjadi kelompok yang tersisih dalam pergulatan politik yang terjadi, baik di tingkat nasional maupun tingkat lokal.

Dalam tulisan ini dilihat perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat pedesaan Jawa, khususnya sehubungan dengan perubahan sosial ekonomi dan budaya yang berlangsung di masyarakat pedesaan sebagai akibat dari berbagai program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah serta kaitannya dengan pola perpindahan penduduk pedesaan.

2. Sekitar Perubahan Masyarakat Pedesaan

Masyarakat pedesaan Jawa, khususnya di daerah kerajaan (Surakarta dan Yogyakarta), telah mengalami perubahan yang berarti sejak dilaksanakannya pemecahan kerajaan Mataram menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Pemrakarsa terjadinya perubahan masyarakat di Jawa sejak abad ke-18 bisa berasal dari penguasa tradisional Jawa ataupun bangsa Barat yang peradabannya relatif telah lebih maju. Tentang kemampuan penguasa Jawa sebagai pemrakarsa bagi pembangunan masyarakat diuraikan oleh Carey (1981) secara panjang lebar, bagaimana Pangeran

Mangkubumi, yang kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono I, memelopori dan mendorong rakyatnya untuk membangun negara dengan cara melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Selanjutnya diceritakan pula tentang keberhasilan Mangkubumi dalam menciptakan kemakmuran bagi rakyat, bukan hanya yang tinggal di sekitar Kraton Mataram, tetapi juga rakyat yang tinggal di daerah *mancanegara*. Carey menyebutkan bahwa saat itu Pulau Jawa merupakan salah satu tempat di muka bumi, tempat pangan tersedia secara lebih dari cukup bagi masyarakatnya. Suasana yang dideskripsikan oleh Carey itu mungkin mirip dengan apa yang telah berhasil diciptakan oleh Orde Baru pada dasawarsa 1970—1980-an di Indonesia, tentu saja dengan cara dan tujuan yang sangat berbeda.

Perkembangan ekonomi yang membawa kemakmuran bagi masyarakat Mataram saat itu telah mendorong munculnya berbagai mata pencaharian baru, yaitu peluang kerja luar-pertanian, yang oleh Sayogya (1982) disingkat dengan puklutan, seperti perdagangan atau pengolahan hasil pertanian. Perkembangan ekonomi telah pula menciptakan dampak ganda pada masyarakat, yaitu bahwa kemakmuran itu telah mendorong terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat pedesaan. Masyarakat desa tidak lagi terkungkung dalam kehidupan atau pola kehidupan sosial-ekonomi tradisional yang lazim disebut sebagai ekonomi subsistensi, tetapi masyarakat telah mulai berubah menuju masyarakat prakapitalis (Boeke, 1982). Masyarakat jenis ini menunjukkan pola kehidupan yang tidak sepenuhnya berorientasi pada ekonomi rumah tangga, namun mereka telah pula terlibat dalam kegiatan ekonomi untuk kebutuhan pasar meskipun masih terbatas pada pasar di tingkat lokal.

Secara perlahan, tetapi pasti, perubahan terus terjadi di dalam masyarakat pedesaan Jawa. Masuknya modal swasta Eropa, yang semula didominasi oleh pemerintah kolonial, tetapi kemudian bergeser oleh modal swasta, membuat pedesaan di Jawa semakin terseret ke dalam arus perubahan yang semakin hebat. Ekonomi perkebunan yang hidup berdampingan secara simbiotik dengan ekonomi petani membuat masyara-

kat pedesaan Jawa, khususnya di daerah kerajaan, terlibat secara langsung dalam ekonomi pasar dunia. Perdebatan tentang bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh ekonomi perkebunan bagi masyarakat pedesaan Jawa terjadi secara gegap gempita (lihat Elson, 1982, Fernando, 1980, Knight, 1984, Padmo, 1988, dan Fasseur, 1986). Di satu pihak ada yang menyatakan bahwa perusahaan perkebunan itu hanya menambah beban bagi petani Jawa yang bebannya sudah sangat berat. Namun, di sisi lain sejarawan menyatakan bahwa betul perusahaan perkebunan itu telah memberi tambahan beban kepada petani, namun tidak dapat diingkari bahwa perusahaan perkebunan telah memberikan tambahan pendapatan uang kontan bagi sebagian dari masyarakat Jawa, terutama penguasa tradisional, elit desa, dan sebagian petani pedesaan.

Argumen yang menyatakan bahwa ekonomi perkebunan semata-mata hanya menciptakan beban dan tidak bermanfaat tampak berlebihan. Tidak dapat dibantah kiranya bahwa memang pada awal perkembangan perusahaan swasta di Jawa, sistem ekonomi pasar bebas belum sepenuhnya dilaksanakan, demikian pula sistem buruh bebas. Artinya bahwa saat itu sebagian besar pengerahan tenaga kerja masih bersifat paksaan dan belum diberi upah. Namun, pada masa kemudian, terutama setelah dilaksanakannya Reorganisasi Agraria pada 1918 di daerah kerajaan, petani mempunyai hak yang kuat untuk memperoleh penghasilan lewat uang sewa tanah dan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan di perusahaan perkebunan.

Kegiatan perusahaan perkebunan di pedesaan di Jawa ini telah menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat pedesaan di sekitarnya. Penghasilan yang diperoleh petani pedesaan dari perusahaan perkebunan itu membuat mereka menjadi pembeli potensial. Hal ini mendorong munculnya berbagai usaha pelayanan dan jasa baru yang sebelumnya belum ada, seperti perdagangan hasil pertanian, kegiatan pemrosesan dan manufaktur serta perdagangan hasil industri pedesaan (lihat Padmo, 1994, 1999).

Beroperasinya perusahaan perkebunan di berbagai daerah di Pulau Jawa, khusus-

nya di daerah kerajaan, merupakan pemicu bagi terjadinya perubahan ekonomi, sosial, dan budaya di kalangan masyarakat pedesaan. Munculnya berbagai pusat kegiatan ekonomi baru, seperti perkembangan Kotagede Yogyakarta, serta pasar-pasar desa, pusat industri pedesaan misalnya konfeksi di beberapa tempat seperti di Wedi, Klaten, serta daerah lain yang dekat dengan perusahaan perkebunan menunjukkan bahwa ekonomi perkebunan merupakan faktor yang dominan bagi bergeraknya roda perubahan ekonomi pedesaan. Berkembangnya ekonomi perkebunan pada dasawarsa 1920-an telah membuat beberapa kelompok masyarakat pedesaan bisa mengandalkan bekerja di perusahaan perkebunan sebagai sumber penghidupannya. Mereka tidak lagi menganggap status sebagai *kuli kenceng*, yaitu pemilik tanah, tetapi menyangga beban berat bagi perusahaan perkebunan sebagai orang terhormat. Kelompok baru ini, yaitu tukang gerobag, merupakan kelompok setengah profesional yang direkrut oleh perusahaan perkebunan dalam mencukupi sarana angkutan bagi hasil perkebunan dari pabrik ke stasiun kereta api.

Munculnya pusat kegiatan ekonomi seperti pasar desa di berbagai tempat di daerah kerajaan mendorong munculnya kegiatan baru, yaitu perdagangan keliling. Pola pergerakan penduduk yang diatur menurut hari pasaran itu telah menciptakan satu pola migrasi yang unik. Secara tradisional kegiatan ekonomi di pusat kegiatan ekonomi di daerah ini diatur sedemikian rupa sehingga selama lima hari pasaran itu para pedagang bisa bergerak secara leluasa dari pasar yang satu ke pasar yang lain sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan (Effendi, 1984). Munculnya pusat-pusat pertumbuhan baru membuat pertukaran semakin ramai dan arus lalu lintas angkutan dari satu kota ke kota lain semakin berkembang. Perkembangan ekonomi pedesaan antara lain ditandai dengan tumbuhnya pasar desa serta tempat pemberhentian di berbagai tempat sepanjang jalan pos seperti di Prambanan, Kebonarum, Ketandan, Penggung, Kartosuro, dan Boyolali.

Munculnya matapencaharian baru di luar pertanian mendorong munculnya kelompok baru di pedesaan. Bekerja sebagai pe-

tani yang semula mendominasi matapencaharian di pedesaan kemudian muncul mata-pencaharian baru seperti tukang gerobag, tukang batu, tukang kayu, bakul pasar, pedagang, serta pengusaha industri pedesaan. Pekerjaan di luar sektor pertanian, yang dikenal sebagai sektor informal itu, terbukti telah menjadi alternatif yang penting bagi masyarakat pedesaan di Jawa sedini dasawarsa 1910-an (*Minderewelvaart Onderzoeken*, 1905). Meningkatnya daya beli karena semakin terbukanya peluang ekonomi membuat masyarakat desa lebih mengenal cara hidup yang lebih baik. Pola hidup seperti cara berpakaian, pola makan, dan corak bangunan rumah telah mengalami perubahan.

Pada era kemerdekaan, program pembangunan yang dilaksanakan, terutama oleh pemerintah Orde Baru, telah memberikan dampak yang nyata pada perubahan masyarakat pedesaan. Pembangunan pertanian yang dikenal dengan revolusi hijau lewat program Bimas, Inmas, Insus, dan Supra-Insus telah mengantarkan Indonesia sebagai bangsa yang diakui oleh FAO pada 1984 sebagai negara yang berhasil dalam mencapai swasembada pangan. Terlepas dari segala kekurangan, secara ekonomis, pemerintah Orde Baru telah mencoba membawa masyarakat pedesaan untuk memasuki suatu era modernisasi. Untuk meningkatkan produksi pangan, pemerintah telah mencoba menerapkan berbagai cara, termasuk rekayasa teknologi biokimia dan rekayasa sosial (Palmer, 1982). Dengan pertimbangan bahwa rekayasa seperti itu hanya bisa dilaksanakan oleh petani yang siap memikul risiko maka tentu saja petani peserta program revolusi hijau adalah mereka yang termasuk petani maju atau petani kaya. Strategi semacam itu tentu harus dipertanyakan karena apabila keadaan ini dipertahankan di berbagai kegiatan pembangunan, dampaknya jelas yaitu yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan jauh tertinggal.

Revolusi hijau, dengan rekayasa tersebut, petani di pedesaan yang masih tradisional secara tegas diperkenalkan dengan budaya modern yang bercirikan rasional, gotong royong secara organis, dan berorientasi pada keuntungan. Kehidupan pedesaan yang masih diwarnai dengan budaya

gotong royong, kerja sama di antara sesama warga, serta adanya elemen lain seperti solidaritas dan *cohesiveness* (lihat Kartodirdjo, 1983; Kartohadikusumo, 1962; dan Kuntjaraningrat, 1976) mulai digantikan hubungan antara sesama warga yang rasional, impersonal, dan *business like relationship*.

Berbagai studi tentang revolusi hijau yang telah dilakukan menunjukkan temuan yang satu sama lain bertentangan. Satu pihak menyatakan bahwa revolusi hijau telah menimbulkan alienasi di kalangan ekonomi miskin di pedesaan dari lapangan dan peluang kerja yang ada di pedesaan. Sementara yang lain menyoroti bahwa pelaksanaan revolusi hijau justru membuka peluang baru bagi masyarakat pencari kerja yang ada di pedesaan. Namun, menurut hemat penulis bahwa ada kegiatan tertentu yang ada di pedesaan telah tergeser oleh kegiatan baru yang sebelumnya belum dipraktekkan oleh masyarakat pedesaan. Dengan menonjolkan hal-hal semacam itu, kesimpulan yang diperoleh tentu saja akan sampai pada kesimpulan pertama. Tidak juga dapat dipungkiri bahwa revolusi hijau telah menciptakan jenis-jenis pekerjaan baru yang semula belum ada atau jenis pekerjaan yang telah ada intensitasnya ditingkatkan sehingga pekerjaan tersebut bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak. Apabila hal-hal seperti itu yang ditonjolkan, tentu saja kesimpulan kedua yang akan dihasilkan. Berkenaan dengan adanya kontroversi tentang dampak yang ditimbulkan oleh Revolusi Hijau, penelitian yang dilaksanakan oleh Survei Agro-Ekonomi dianggap cukup fair dalam memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan revolusi hijau di Indonesia (lihat Prabowo dan Sajogya, 1981; Deuster, 1981; Collier, 1981).

Satu hal yang menarik dari apa yang ditemukan oleh penelitian tentang revolusi hijau adalah bahwa teori Geertz (1963) tentang involusi pertanian yang selama ini diterima sebagai kebenaran telah tumbang. Menurut teori ini sistem sosial masyarakat mempunyai kemampuan untuk menyerap tenaga kerja, atau beban sosial lain yang makin meningkat pada sumber yang terbatas. Dalam proses involusi ini masyarakat pedesaan Jawa menyesuaikan pada kerja, sistem pembagian hasil, dan kelembagaan

sosial menjadi pola-pola kompleks, yang menjamin adanya pembagian pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat, meskipun dalam kehidupan yang subsisten. Proses seperti itu terbukti dalam penelitian yang dilakukan pada 1956 oleh Armida dan Wismoyo (1982), yang menunjukkan bahwa kestabilan sosial berhasil diciptakan dalam situasi peningkatan kepadatan penduduk dan meningkatnya kemiskinan. Namun, keadaan pada pascarevolusi hijau telah berubah. Beberapa ahli yang telah melakukan penelitian mengemukakan bahwa di sebagian besar desa di Jawa, involusi pertanian telah terpatahkan (lihat Lyon, 1970; Collier, 1972; Huskens, 1976; Strout, 1976; Hayami dan Kikuchi, 1981; dan Tjondronegoro, 1980). Petani kaya lebih lugas dalam mengelola usaha taninya dan tidak memberikan kesempatan untuk 'berbagi kemelaratan' seiring dengan diterapkannya anjuran pengelolaan usaha tani yang komersial melalui Bimas, Inmas, dan Insus.

Dengan memperhatikan hasil penelitian tersebut jelaslah bahwa masyarakat pedesaan yang diwarnai oleh suasana harmonis, tolong menolong, sama-sama miskin, dan solidaritas serta perimbangan moral dalam setiap pengambilan keputusan, yang dalam konsep Scott (1982) adalah ekonomi moral telah berubah secara drastis. Sementara itu, bentuk kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh pertimbangan rasional, unsur-unsur impersonal, dan *business like relationship* telah menjadi gejala umum di dalam kehidupan masyarakat pedesaan Jawa, yang dalam konsep Popkin (1977) disebut ekonomi petani yang rasional.

Apabila dinamika perubahan telah terjadi di pedesaan, di kota juga telah muncul berbagai kegiatan baru. Revolusi hijau yang telah mendorong terjadinya perubahan pada lingkungan manusia pedesaan itu diikuti oleh dinamika yang kalah gegap gempitanya di sektor industri dan konstruksi di perkotaan.

Peluang kerja baru seperti sektor *non-farm* dan *off-farm* merupakan peluang kerja yang menyerap tenaga kerja, terutama yang tidak terdidik, yang terlempar dari pasaran kerja di sektor pertanian pedesaan (Padmo, 1999). Pergerakan penduduk desa ke kota, secara periodik, musiman, atau *nglaju* (Mantra, 1983) merupakan katup

pengaman bagi munculnya keresahan sebagai akibatnya dilaksanakannya revolusi hijau. Hubungan antara desa-kota yang terjadi lewat pergerakan penduduk itu memberikan keuntungan kepada masyarakat desa untuk berkembang (Kartodirdjo, 1979).

3. Faktor Pendorong dan Faktor Penarik

Aspek yang lazim dibahas dalam pembahasan tentang pergerakan penduduk adalah faktor pendorong atau *pushing factor* dan faktor penarik atau *pulling factor*. Pada masa awal penyebab utama bagi terjadinya pergerakan penduduk adalah faktor pendorong yang berupa tekanan yang sangat berat dari penguasa, kemiskinan, bencana alam, dan faktor lain seperti politik. Pergerakan penduduk dari Jawa Tengah ke Jawa Barat yang terjadi pada abad ke-18 (Jones, 1981) merupakan keputusan politik penguasa kolonial yang memutuskan untuk memindahkan sebagian penduduk Jawa Tengah untuk mengisi daerah Jawa Barat yang masih kosong guna mengisi kegiatan produksi pangan di daerah tersebut. Sementara itu, pergerakan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur khususnya ke Banyuwangi Selatan yang terjadi pada akhir abad ke-19 boleh jadi karena tekanan penguasa dan kemiskinan yang terjadi di Jawa Tengah. Pada abad ke-20 pergerakan ke timur masih berlanjut, yaitu ke Daerah Jember - Besuki dan sekitarnya seperti Tanggul. Alasan dari pergerakan ke timur pada periode akhir ini bisa jadi karena sebab serupa, tetapi bisa jadi karena ada sebab tambahan lain, yaitu ketidakpuasan mantan *bekel* yang tidak lagi memperoleh posisi sebagai kepala desa pada saat dilaksanakan reorganisasi agraria di daerah kerajaan sejak 1912 sampai 1918. Beberapa mantan *bekel* di Surakarta ada yang melakukan pemberontakan karena merasa tidak puas. Pemberontakan itu berhasil dipadamkan oleh penguasa dan sisa-sisa pengikut mereka melarikan diri ke timur, antara lain ke Jember.

Pergerakan penduduk antardaerah di Pulau Jawa memang bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Pertumbuhan penduduk, yang di beberapa daerah telah menimbulkan akibat menurunnya daya dukung wilayah, cepat atau lambat tentu akan membuat daerah tersebut menjadi miskin. Sementara

itu, perluasan atau pembukaan daerah pertanian baru, peningkatan produktivitas hasil pertanian, dikembangkannya hasil pengolahan dan manufaktur, perdagangan atau pelayanan musiman tentu akan menguntungkan tenaga kerja dari daerah lain.

Pergerakan penduduk di Jawa Tengah bagian utara ke Jawa Barat pada abad ke-19 diikuti oleh pergerakan ke bagian lain Pulau Jawa pada masa berikutnya. Penduduk Pulau Jawa yang terkonsentrasi di wilayah seperti lembah Sungai Solo dan Sungai Serayu, daerah Surabaya, Malang, pantai utara Jawa yang membentang dari Semarang sampai Cirebon pada bagian kedua abad ke-19 telah menyebar ke berbagai daerah lain di Jawa (Moebius, 1956). Apabila migrasi internal di Jawa telah berlangsung sejak lama, pergerakan penduduk Jawa ke luar Jawa juga telah berlangsung pada saat yang sama. Banyak penduduk Jawa bermukim di Kalimantan Selatan. Keturunan mereka dan penduduk dari daerah lain, seperti orang Bugis dari Sulawesi, maupun penduduk setempat, yaitu orang Dayak, berbaur menjadi kelompok masyarakat baru yaitu orang Banjar, yang merupakan penduduk mayoritas di Kalimantan (Horstman dan Rutz, 1980:22).

Data dalam sensus penduduk tahun 1930 menunjukkan bahwa pergerakan penduduk Pulau Jawa yang terjadi pada dasawarsa awal abad ke-20 merupakan arus manusia ke arah wilayah yang berdekatan dengan daerah asal dengan perkecualian daerah Besuki dan Sumatera. Horstman dan Rutz selanjutnya melaporkan bahwa di antara 19 daerah di Pulau Jawa yang didaftar, hanya Besuki yang tidak mengirimkan penduduknya ke luar daerah lain di Jawa atau Sumatera. Besuki merupakan daerah tujuan utama pergerakan penduduk Pulau Jawa di samping tujuh daerah tujuan lain seperti Priangan, Banyumas, Semarang, Kediri, Malang, Surabaya, Jepara-Rembang.

Pola pergerakan perpindahan penduduk ke luar daerah bisa ke daerah terdekat atau bisa juga ke daerah yang jauh dari daerah asal. Sebagaimana yang terjadi di daerah Banten, daerah ini adalah daerah yang kondisi lahannya tidak subur. Penduduk Banten bermigrasi ke daerah terdekat yang menawarkan peluang kerja, yaitu Batavia.

Sementara itu, daerah Kedu, yang keadaan alamnya kurang menguntungkan, penduduknya tidak bermigrasi ke daerah terdekat karena daerah tersebut tidak lagi mampu menampung kedatangan mereka, maka daerah tujuan mereka adalah Besuki di ujung timur Pulau Jawa atau Sumatera. Penduduk Kediri banyak yang bergerak ke Surabaya, meskipun tujuan utama pergerakan penduduk di Jawa Tengah bagian selatan dan Jawa Timur masih daerah Besuki.

Pada saat yang hampir bersamaan pemerintah kolonial telah memindahkan sebagian penduduk Jawa ke tanah seberang dengan program kolonisasi. Masyarakat yang dipindahkan ini pada umumnya secara ekonomis adalah kelompok miskin di pedesaan. Kebijakan pemindahan penduduk itu adalah manifestasi dari kebijakan pemerintah yang dikenal sebagai Politik Etis, salah satu di antaranya adalah migrasi. Maksud pemindahan penduduk itu adalah untuk memecahkan masalah kemiskinan dan kekurangan lahan pertanian di pedesaan Jawa dan sekaligus mengurangi kepadatan penduduk di pedesaan Jawa. Satu hal yang menarik untuk dicatat bahwa di samping program pemindahan penduduk yang diorganisasikan oleh pemerintah kolonial terdapat sekelompok orang yang dengan sukarela meninggalkan tanah Jawa menuju ke tanah seberang untuk mencari penghidupan baru, yang disebut sebagai transmigran spontan (lihat Sajogya, 1962). Menurut Sensus Penduduk 1930, penduduk Sumatera yang lahir di Jawa sebesar 765.000 jiwa (Horstman dan Rutz, 1982). Tujuan perpindahan penduduk Jawa di Sumatra adalah daerah Sumatra Utara bagian timur, yaitu daerah perkebunan di Deli dan Medan.

Para pengambil kebijakan menganggap bahwa perpindahan penduduk secara swakarsa atau transmigrasi spontan (Utomo, 1957: 63) ini sebagai transmigrasi liar (Purboadiwidjono, 1986). Sementara itu, Heeren lebih senang menyebut dengan transmigrasi bebas (Heeren, 1989:33) karena tidak berada dalam skema atau rencana pemerintah. Dari kepentingan administrasi pemerintah, keberadaan transmigran swakarsa tersebut tidak sesuai atau semacam mengganggu rencana pemerintah. Namun, apabila dilihat dari segi potensi calon trans-

migran untuk berhasil di tempat yang baru, ternyata transmigran swakarsa ini, secara teoretis, mempunyai potensi lebih besar. Dalam menentukan keberhasilan seseorang dalam usahanya di tempat yang baru ini, tentu banyak faktor yang menentukan, namun sekali lagi motivasi yang kuat dari diri transmigran sendiri merupakan modal yang penting.

Di samping faktor yang disebut di atas, terdapat faktor pendorong lain yaitu bencana alam. Bencana alam seperti letusan Gunung Merapi pada 1969 merupakan sebab seseorang melakukan perpindahan. Satu kecenderungan yang lazim dijumpai dalam situasi seperti itu adalah bahwa penduduk akan dipindahkan bukan pindah secara berkelompok, yang lazim disebut sebagai transmigrasi *bedol desa*.

Pada masa kolonial, perekrutan pemindahan penduduk dalam program kolonisasi dilakukan dengan cara memberikan jatah tertentu kepada kepala desa dari penduduk desa untuk dipindahkan. Sementara lurah desa sibuk mencari orang untuk dipindahkan, ternyata ada sekelompok masyarakat di tempat lain yang dengan sukarela berangkat menuju ke Tanah Seberang. Karena keberangkatan dan jumlah mereka tidak tercatat oleh petugas pemerintah, data statistik tentang mereka sulit dilacak. Meskipun demikian, isyarat yang menyatakan bahwa transmigran swakarta ini untuk daerah dan waktu tertentu cukup signifikan dilaporkan oleh Sajogya (1982) bahwa pada 1953 jumlah penduduk di delapan desa di daerah Tanggamus dekat Pringsewu Lampung sebanyak 20.000 jiwa. Lebih jauh ia memperkirakan jumlah transmigran swakarta di Daerah Way Sekampung kurang lebih 40.000 jiwa. Mengutip laporan Dinas Penyeberangan Jawatan Kereta Api antara Merak (Jawa) dan Panjang (Sumatra) selama tahun 1953, jumlah penumpang yang menuju Sumatra adalah 15.848 lebih tinggi daripada penumpang yang menuju Pulau Jawa. Pada tahun 1955, selisih angka itu menjadi 13.227 (Heeren, 1979). Data tersebut sekali lagi mengisyaratkan bahwa pada dasawarsa 1950-an pergerakan penduduk di Indonesia yang utama adalah dari pulau Jawa ke Pulau Sumatera.

Faktor penarik bagi timbulnya pergerakan penduduk adalah berita tentang peluang

yang lebih besar untuk usaha di daerah baru dari berbagai saluran komunikasi. Informasi tentang hal itu yang dibawa oleh transmigran yang telah berhasil merupakan informasi yang sangat efektif. Faktor penarik lainnya adalah ketersediaan lahan pertanian yang melimpah, kesempatan untuk mencari tambahan pendapatan di luar kegiatan utama cukup besar, dan kenyataan bahwa pendapatan yang diperoleh di tempat yang baru pada umumnya lebih besar daripada tempat yang lama (Heeren, 1979) secara bersama-sama merupakan faktor penarik yang cukup kuat dalam memotivasi penduduk pedesaan Jawa untuk bermigrasi ke Tanah Seberang.

4. Karakteristik Migran

Menurut pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1973, transmigrasi swakarsa didefinisikan sebagai transmigrasi yang dilaksanakan atas dorongan sendiri. Transmigran yang bersangkutan dengan kemauan dan biaya sendiri pindah dan menetap di daerah transmigrasi (Indonesia, 1981: 1-2). Dalam kenyataannya terdapat transmigran swakarta yang memperoleh bantuan dari pemerintah atau yayasan tertentu, yang lazim disebut sebagai transmigran swakarta pola baru. Sementara itu, transmigran yang dalam perjalanan sampai dengan pengadaan rumah, lahan pertanian, serta biaya hidup di tempat yang harus ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan dan pemerintah hanya membantu sekedar-nya saja disebut transmigran swakarta pola lama.

Apabila secara konseptual lapisan termiskin penduduk pedesaan adalah kelompok yang paling potensial untuk melakukan pergerakan ke luar desa ternyata bukti empiris mendukung hal tersebut. Penelitian yang dilakukan di berbagai daerah transmigrasi menunjukkan bahwa transmigran swakarta cenderung lebih berhasil daripada transmigran umum. Keberhasilan mereka itu disebabkan oleh akal daya dan kewirausahaan mereka yang memungkinkannya melihat dan memanfaatkan kesempatan dan peluang guna memperbaiki hidup mereka (Hardjono, 1982:175). Di lokasi transmigrasi spontan Bandar Harapan, Lampung, pendatang yang berasal dari Sukabu-

mi, Jawa Barat, Bandung, dan Jakarta telah menikmati kehidupan yang jauh lebih baik daripada ketika di daerah asal (*Sinar Harapan*, 4 November 1981). Pemukim di daerah transmigrasi spontan di Parigi, Sulawesi Tengah yang datang lebih dulu dan berhasil menarik saudara-saudaranya dan kenalan untuk ikut bertransmigrasi. Surplus pangan dan terbatasnya tenaga kerja mendorong arus transmigrasi spontan ke Parigi (Davis, 1982:122).

Karena transmigran spontan harus menanggung seluruh biaya dalam perjalanan dan pengadaan sarana di pemukiman baru, mereka memerlukan cadangan biaya yang relatif besar. Berkaitan dengan hal tersebut maka ciri transmigran spontan ternyata secara ekonomis relatif sama dengan transmigran umum, yaitu transmigran yang dibiayai pemerintah. Dalam hal pemilikan lahan pertanian di tempat asal, luas usaha tani, dan jumlah uang bekal yang dibawa serta bagi transmigran spontan dan transmigran umum masing-masing adalah 0,30 hektar dan 0,28 hektar, 0,42 hektar dan 0,55 hektar, serta Rp 61.000,00 dan Rp 15.000,00 (Sujarwadi: 1984:7). Namun sekali lagi, hasil penelitian ini menggarisbawahi bahwa motivasi untuk mengadu nasib yang lebih kuat dari transmigran spontan daripada transmigran umum merupakan pembeda yang lebih signifikan di antara keduanya.

5. Penutup

Dari apa yang diuraikan pada bagian terdahulu beberapa simpulan dapat dikemukakan sebagai berikut.

- a. Selama dua abad terakhir, masyarakat pedesaan di Jawa telah mengalami perubahan sebagai akibat dari adanya dinamika internal seperti pertambahan penduduk dan pengaruh yang datang dari luar seperti masuknya pengaruh Barat yang dibawa bangsa Belanda. Dalam proses itu masyarakat pedesaan tradisional-agraris telah bergeser ke masyarakat praindustri. Diperkenalkannya pendidikan modern dan ekonomi perkebunan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 mempercepat berlangsungnya perubahan sosial, ekonomi, dan budaya.
- b. Perkembangan ekonomi di Jawa, terutama yang terjadi pada awal abad ke-20, telah mendorong munculnya pusat-pusat pertumbuhan di berbagai tempat di Jawa, khususnya di daerah kerajaan. Masuknya ekonomi perkebunan ke tengah ekonomi pedesaan berarti masuknya ekonomi uang ke tengah ekonomi subsistensi. Ini berarti menguatnya daya beli masyarakat pedesaan, yang mendorong munculnya kelompok baru di masyarakat, yaitu wiraswasta, di tengah masyarakat petani pedesaan yang semula didominasi oleh petani subsistensi. Wiraswasta baru ini, yang berkembang pada dasawarsa 1920-an antara lain di Wedi, Juwiring, Klaten, dan Kotagede Yogyakarta, atau tempat lain seperti Tanggul, Kraksaan, Kertosono, Maospati di Jawa Timur, melakukan pergerakan dari satu pusat kegiatan ekonomi ke pusat kegiatan ekonomi lain sesuai dengan hari yang disepakati. Sementara itu, pergerakan penduduk dengan alasan memanfaatkan peluang ekonomi di daerah lain seperti dibukanya perusahaan perkebunan, dilakukan oleh penduduk Jawa Tengah Selatan seperti Kedu dan Yogyakarta dan daerah lain di Jawa Timur seperti Madiun, Malang, Ngawi, dan Madura dengan tujuan utama adalah Besuki.
- c. Pertambahan penduduk merupakan faktor internal yang mempengaruhi terjadinya dinamika perubahan di dalam masyarakat pedesaan dalam pola kerja dan kelembagaan sosial menjadi pola yang semakin kompleks, yang oleh Geertz disebut dengan konsep *agricultural involution*. Sementara itu, dalam sistem pembagian hasil terjadi proses yang sama, yang dirumuskan oleh Geertz dengan konsep *shared poverty* itu. Pada dasawarsa 1950-an, konsep tersebut masih merupakan fenomena yang dapat ditemukan di dalam masyarakat pedesaan di Jawa. Namun, pada kurun pasca-revolusi hijau, yaitu pada dasawarsa 1970-an, hasil penelitian yang dilakukan oleh para sarjana menunjukkan bahwa konsep tersebut telah terputihkan.
- d. Transmigran spontan atau swakarsa perlu didukung dan dikembangkan oleh

semua pihak karena dari segi dana lebih murah dan dari segi kualitas peserta transmigran ini lebih baik karena mereka mempunyai motivasi untuk maju lebih kuat daripada transmigran umum. Transmigran swakarsa yang berhasil, yang kemudian mengajak saudara dan kenalan di Jawa untuk bertransmigrasi merupakan cara yang efektif dalam pelaksanaan program transmigrasi.

- e. Apabila transmigrasi dianggap sebagai salah satu bagian dari strategi pembangunan ekonomi Indonesia, cara yang bisa ditempuh adalah membangun pusat pertumbuhan baru di luar Jawa sehingga pola pergerakan yang terjadi di Jawa maupun dari Jawa ke luar Jawa sejak abad yang lalu bisa terjadi secara alami. Apabila strategi semacam itu bisa dikembangkan, konflik yang mungkin timbul sebagai akibat pertemuan antara pendatang dan penduduk asli bisa ditekan sekecil mungkin.
- f. Sebagai tesis dari tulisan ini dapat disebutkan bahwa perpindahan penduduk merupakan fenomena ekonomi dan sosial dengan dorongan untuk mencari penghidupan yang lebih baik dapat diarahkan oleh pemerintah dengan membuat pusat pertumbuhan di daerah yang kurang berkembang di luar Jawa. Upaya semacam ini bukan saja akan merupakan pemerataan dalam membangun fasilitas pelayanan ekonomi, tetapi juga menciptakan suasana pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Armida dan Wismoyo, 1982. "Transmigrasi: beberapa Masalah pemikiran" dalam *Ekonomika: Mimbar Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Vol. X, No. 2.
- Boeke, D.H., 1982. *The Pre-capitalistic Economy*.
- Carey, P.B.A., 1981. "Waiting for the Ratu Adil ('Just King'): the Javanese Village Community on the Eve of the Java War (1825-1830)" Paper to be presented in the "Second Anglo-Dutch Conference on Comparative Colonial History", 23-25 September 1981, Leiden, The Netherlands.
- Collier, C. dkk., 1972. *High Yielding Varieties and Rural Change Tebasan: An Example in Java*, Survey Agro-Ekonomi.
- , 1981. "Declining Labor Absorption (1878-1980) in Javanese Rice Production." Bogor: Agro-economic Survey Occasional paper no. 2.
- Davis, G., 1982. "Transmigrasi Swakarsa: Kasus Parigi" dalam Hardjono, Ed., *Transmigrasi dari Kolonisasi Sampai Swakarsa*, Jakarta: Gramedia.
- Deuster, Paul, 1981. "Green Revolution in West Sumatra and South Sulawesi." in Hansen, G., Ed., *Agricultural and Rural Development in Indonesia: Westview Special Studies in Social, Political, and Economic Development*, Boulder, Colorado: Westview Press. pp. 79-95.
- Elson, R.E., 1982. *The Sugar Industry and Peasantry: the Introduction of Cultivation System in Pasuruan Residency*, Melbourne: Oxford UP.
- Fasseur, C., 1986. "The Cultivation System and its impact on the Dutch Colonial Economy and the Indigenous Society in the Nineteenth Century java." in bayly and D.H.A. Kolff, Eds., *two Colonial Empires Comparative Essays on the History of Indonesia and India in the 19th Century*, Dordrecht: martijunus Nijhoff, pp. 137-154.
- Fernando, R.M., 1982. "Peasants and Plantation Economy: The Social Impact of the European Plantation Economy in Cirebon Residentie From the Cultivation System to the End of First Decade of the Twentieth Century." Tesis Doktor Universitas Monash.

- Geertz, C., 1963. *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*. Jakarta: Bharatara.
- Gonggrijp, 1928. *Schets Eener Economische Geschiedenis van Nederlandsch Indie*.
- Hardjono, Joan, 1982. *Transmigrasi Dari Kolonisasi sampai Swakarsa*. Jakarta: Gramedia.
- Hayami dan Kikuchi, 1981. *Asian Village Economy at the Crossroad an Economic Approach to institutional Change*. Tokyo: University of Tokyo Press.
- Heeren, H.J., 1979. *Transmigrasi di Indonesia*. Jakarta: Obor.
- Horstman, Kurt dan Rutz, Werner, 1980. *The Population Distribution on Java 1971. A map of Population Density by subdistricts and its analysis*. Tokyo: Institute of Developing Economies.
- Jones, Gavin, 1981. "Population Migration in Java". Mimeograph Dept. of Demography, RSPacS, ANU.
- Kartodirdjo, Sartono. 1983. *Kepemimpinan dalam Sejarah Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo. 1962. *Desa*. Bandung: Sumur Bandung.
- Knight, R., 1984. "Sugar Industry and Peasant Economy in Pekalongan Residency." Paper prepared to be presented in a Seminar, Monash University, 2 May.
- Kuntjaraningrat, "Desa Tjelapar di Jawa". dalam Kuntjaraningrat, ed., 1982. *Desa-desa di Jawa*. Jakarta: LP3ES.
- Lyon, M., 1970. *Bases Conflict in Rural java*. Research Monograph no. 3 Centre of Southeast Asian Studies University of California. Berkeley, USA.
- Ida Bagus Mantra, 1983. "Seasonal migration in Java." Mimeograph Population Studies Centre Gadjah Mada University
- "Overzicht van de Uitkomsten der gewestelijke onderzoekingen naar de Inland-sche Handel en nijverheid en daaruit gemaakte gevolgtrekingen." Deel I. Tekst. Batavia, 1909.
- Padmo, Soegijanto. 1994. *The Cultivation of Vorstenlands Tobacco in Surakarta Residency and Besuki Tobacco in Besuki Residency and Its Impact on the Economy and the Peasants in the Localities: 1860 - 1980*. Yogyakarta: Aditya Media.
- _____, 1999. *The Cultivation of Vorstenlands Tobacco in Surakarta Residency and Its Impact on the Economy and Society in the Locality, 1860-1980*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Palmer, L., 1982. *Green Revolution in Indonesia*. UNRISD.
- Popkin, S.L., 1979. *The Rational Peasants: The Political Economy of Rural Society in Vietnam*. Berkeley: University of California Press.
- Prabowo, Dibyo dan Sajogya, 1981. "Green Revolution in Sidoarjo, East Java and Subang, West Java." in Hansen, G., Ed., *Agricultural and Rural Development in Indonesia*, pp. 68-78.
- Roso, Setyo. "Meninjau pemukiman transmigrasi spontan Lampung" *Sinar Harapan*, 4 November 1981.
- Sajogya, 1982. "Peluang Kerja Luar Pertanian: Studi tentang Perubahan Masyarakat Desa di Prop. Jawa Barat." Bogor: LPSP IPB.
- Sajogya dan Pudjiwati Sajogya, 1974. *Ekologi Pedesaan*. Bogor LPSP IPB.
- Sanders, T.N, 1967. *Rural Society*. NY: McGraw-Hill

- , 1992. *Pembangunan Desa di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Scott, James C., 1976. *The Moral Economy of the Peasant Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. New Haven and London: Yale UP.
- Strout, Allan, 1976. dalam Masri Singarimbun dan David Penny, *Penduduk dan kemiskinan kasus Sri Hardjo*. Jakarta: Bhratara.
- Sujarwadi, "Transmigrasi Swakarsa, Transmigrasi Nelayan. Transmigrasi perkebunan, dan Transmigrasi Industri" dalam Rukmasi Warsito, dkk. Eds., *Transmigrasi dari daerah Asal sampai Benturan Budaya di tempat pemukiman*. Jakarta: Rajawali, 1984.
- Swasono, Sri Edi dan Masri Singarimbun, Eds., 1986. *Transmigrasi di Indonesia 1905-1985*. Jakarta: Penerbit UI.
- Tadjuddin Noer Effendi, 1984. "Ekonomi Pedesaan di Daerah Jatinom". Laporan kemajuan penelitian Ekonomi Pedesaan di Kabupaten Klaten PPK UGM.
- Tjondronegoro, S.M.P. .1977. *Mencari Pola Transmigrasi Baru: Penjajagan Konsep*. Bogor: LPSP IPB.
- Utomo, Kampto. 1957. *Masyarakat Transmigrasi Spontan di daerah Wai Sekampung (lampung)*. Disertasi IPB.
- Warsito, Rukmadi dkk, eds., 1994. *Transmigrasi dari Daerah Asal Sampai benturan Budaya di tempat Pemukiman*. Jakarta: Rajawali.